

SKRIPSI

PENGATURAN PENGENDALIAN SAMPAH PLASTIK MENURUT

HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

(Studi: Implementasi Oleh Pemerintah Kota Padang)

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian

Persyaratan Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Salsabila Prescilia

2110111010

Program Kekhususan: Hukum Internasional (PK VI)



PEMBIMBING

Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H.,

Dewi Enggriyeni, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

	No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa: SALSABILA PRESCILIA	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Bandung /12 April 2003 b. Nama Orangtua : Taswil AB and Rosneli c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Internasional e. No. BP : 2110111010		f. Tanggal Lulus : 20 Agustus 2025 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 4 Tahun x Bulan i. IPK : 3,96 j. Alamat : Jl. Durian Tarung, Padang City, West Sumatera.

PENGATURAN PENGENDALIAN SAMPAH PLASTIK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL (STUDI: IMPLEMENTASI OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG)
(Salsabila Prescilia, 2110111062, Program Kekhususan Hukum Internasional (PK VI), Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 123 Halaman, 2025)

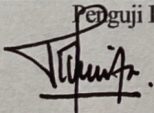
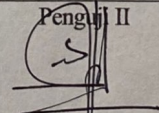
ABSTRAK

Sampah plastik merupakan isu global yang mendesak karena berdampak pada kesehatan manusia dan pencemaran lingkungan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *Sustainable Development Agenda 2030* dalam Resolusi Majelis Umum No. A/RES/70/1 menetapkan target untuk pengurangan sampah plastik secara global yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs) tujuan ke-12 dan 14, serta dalam Amandemen Konvensi Basel Tahun 2019 dalam (Lampiran II, VIII, dan IX). Indonesia sebagai penghasil sampah plastik terbanyak, memerlukan pengaturan hukum yang komprehensif dari tingkat internasional hingga lokal. Kota Padang, sebagai ibu kota Sumatera Barat menghasilkan 647 ton sampah/hari, dari jumlah tersebut 19,84% merupakan sampah plastik. Rumusan masalah yang dikemukakan sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan pengendalian sampah plastik ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional? (2) Bagaimana implementasi pengendalian sampah plastik oleh Pemerintah Kota Padang? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif empiris dan pendekatan penelitian yaitu *statute approach* dan *conceptual approach*. Data dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan, studi lapangan, dan *web sourcing*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat hukum internasional diatur melalui Amandemen Konvensi Basel tahun 2019, (Lampiran II, VIII, dan IX) dan SDGs tujuan ke-12 dan 14. Dalam hukum positif Indonesia pengaturan pengendalian sampah plastik telah diintegrasikan dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen. Di tingkat lokal, Kota Padang menerapkan Peraturan Walikota Padang No 36 Tahun 2018 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik. Namun, implementasinya menghadapi tantangan yaitu rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan ketersediaan alternatif kantong ramah lingkungan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dengan tingkat kepatuhan pelaku usaha terutama di pasar tradisional, sehingga terdapat kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan.

Kata Kunci: Pengendalian, Sampah Plastik, Hukum Internasional, Hukum Nasional, Implementasi Kebijakan, Pemerintah Kota Padang.

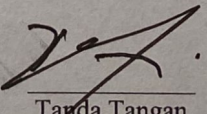
Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada tanggal **20 Agustus 2025**.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I 	Penguji II 
Nama Terang	Magdariza, S.H., M.H	Sri Oktavia, S.H., M.Sc., Ph.D.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Internasional: **Dr. Delfiyanti, S.H., M.Hum.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	Alumni University Number	Student Name: SALSABILA PRESCILIA	Alumni Faculty Number
	a. Place/Date of Birth : Bandung /12 April 2003 b. Parent's Name : Taswil AB and Rosneli c. Faculty : Law d. Concentration : International Law e. No. BP : 2110111010		f. Graduation Date : August 20 th 2025 g. Pass Predicate : Cumlaude h. Study Duration : 4 years x months i. GPA : 3,96 j. Address : Jl. Durian Tarung, Padang City, West Sumatera.

REGULATION OF PLASTIC WASTE CONTROL ACCORDING TO INTERNATIONAL AND NATIONAL LAW (STUDY: IMPLEMENTATION BY THE CITY GOVERNMENT OF PADANG)

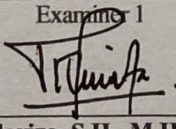
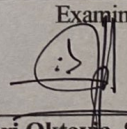
(Salsabila Prescilia, 2110111010, International Law Specialization Program (PK VI), Faculty of Law, Andalas University, 127 Pages, 2025)

ABSTRACT

Plastic waste is an urgent global issue because it affects human health and environmental pollution. The United Nations (UN), through the Sustainable Development Agenda 2030 in General Assembly Resolution No. A/RES/70/1, has set global targets for reducing plastic waste, namely Sustainable Development Goals (SDGs) 12 and 14, as well as in the 2019 Amendment to the Basel Convention (Annexes II, VIII, and IX). Indonesia, as the largest producer of plastic waste, requires comprehensive legal regulations from the international to the local level. The city of Padang, as the capital of West Sumatra, produces 647 tons of waste per day, with 19.84% of that being plastic waste. The research questions posed are as follows: (1) How is plastic waste control regulated from the perspective of international and national law? (2) How is plastic waste control implemented by the City Government of Padang? This research was conducted using empirical normative methods and research approaches using a statutory approach and conceptual approach. Data was collected through literature review, field study, and web sourcing. In Indonesian positive law, regulations on plastic waste control have been integrated into Law No. 18 of 2008 on Waste Management, Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, Government Regulation No. 81 of 2012 on Household Waste Management and Similar Household Waste, and Ministerial Regulation No. 75 of 2019 on the Roadmap for Waste Reduction by Producers. At the local level, the City of Padang has implemented Mayor Regulation No. 36 of 2018 on the Control of Plastic Shopping Bag Use. However, its implementation faces challenges, including low public awareness, limited availability of environmentally friendly alternatives, and weak supervision and enforcement, particularly among businesses in traditional markets, resulting in a gap between regulations and on-the-ground practices. **Keyword: Control, Plastic Waste, International Law, National Law, Policy Implementation, Padang City Government.**

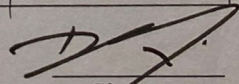
This thesis has been defended in front of the Examiner Team and declared Passed on **August 20th, 2025.**

Examiner,

Signature	Examiner 1 	Examiner 2 
Name	Magdariza, S.H., M.H	Sri Oktavia, S.H., M.Sc., Ph.D.

Acquainted,

Head of the Department of International Law : **Dr. Delfiyanti, S.H., M.Hum.**


Signature

Alumni have registered with the Faculty/University and received an alumni number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: